

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abubakar, Lastuti dkk, 2012, *Cybernotary dalam Aktivitas Notaris di Indonesia*, Books Terrace & Library, Bandung
- Adjie, Habib, 2009, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Anand, Ghansham, 2014, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Zifatama, Sidoarjo.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal A., 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Cetakan kedelapan, Jakarta.
- Harris, Freddy dan Leny Helena, 2017, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta.

- Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani, 2003, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Cetakan ke-I, Jakarta.
- Kie, Than Tong, 2007, *Studi Notariat & Serba – Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1977, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Cetakan pertama, Jakarta
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Nurita, Emma, 2012, *Cybernotary (Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran)*, Refika Aditama, Bandung.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2009, *Jati Diri Notaris Indonesia : Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Pramusinto, Agus, 2009, *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*, Kerjasama Penerbit Gava Media, JIAN-UGM dan MAP-UGM, Yogyakarta.
- Saifuddin, Azwar, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta.
- Subekti, 1987, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sukarni, 2009, *Cyber Law: Kontrak Elektronik Dalam Bayang Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Bandung.
- Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Thamrin, Husni, 2010, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Tobing, G.H.S Lumban, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Ketiga, P.T. Gelora Aksara, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

## **B. Jurnal/Artikel/Tesis-Disertasi**

Budiman, Hartanto, 2012, “Tanggung Jawab Notaris Atas Perlindungan Data Pribadi dalam Akses Interoperabilitas Informasi Data Kependudukan”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Budiono, Herlien, *Makalah Seminar Nasional “Eksistensi Notaris dalam Aktivitas cyber notary”*, Kerjasama Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Hotel Preanger, Bandung, 17 Maret 2012.

Hermawan, I Made, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris atas Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Penghadapnya”, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol.7 No.1, Maret 2017

Makarim, Edmon, “Interoperabilitas Identitas Digital Dalam Transaksi Elektronik Lintas Negara: Suatu Kajian Hukum Terhadap Sistem Identifikasi Dan Autentikasi Elektronik Menjelang Asean Community 2015”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-44 No.2 April-Juni 2015.

Refianti, Rika, 2013, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pasca Berlakunya Pasal 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Saputra, Deny dan Sri Endah Wahyuningsih, “Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT dalam Menjalankan Tupoksinya dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik”, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3 September 2017.

Utomo, Hatta Isnaini Wahyu dan Hendry Dwicahyo Wanda, “Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 24 Issue 3, Juli 2017.

Wartini, Sri, “Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Sanitary And Phythosanitary Agreemant, Studi Kasus: Keputusan Appellate Body WTO Dalam Kasus Hormone Beef Antara Uni Eropa Dengan Amerika Serikat”, *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 14 April 2007.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

### **D. Internet**

Irma Devita, “Cyber Notary”, [irmadevita.com](http://irmadevita.com) , diakses tanggal 13 Februari 2018.

-----, “Prinsip-prinsip Pengenalan Pengguna Jasa Notaris”, [irmadevita.com](http://irmadevita.com), diakses tanggal 27 Juli 2018.



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN OLEH NOTARIS**  
MUHAMMAD BAYU AZHARI, Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum  
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Surya Jaya, “Cyber Notary Dalam Perspektif Hukum Pembuktian”,  
<http://muhammadrizalrustam.wordpress.com/tag/cyber-notary/>, diakses tanggal  
13 Februari 2018.

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573298b2a4142/7-hal-yang-sering-  
menyeret-notaris-ke-pusaran-kasus](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573298b2a4142/7-hal-yang-sering-menyeret-notaris-ke-pusaran-kasus), diakses tanggal 17 Juli 2018

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b5585deb2f37/advokat-dipastikan-tak-  
bisa-bersidang-jika-tak-mendaftar-di-e-court](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b5585deb2f37/advokat-dipastikan-tak-bisa-bersidang-jika-tak-mendaftar-di-e-court), diakses tanggal 27 Juli 2018